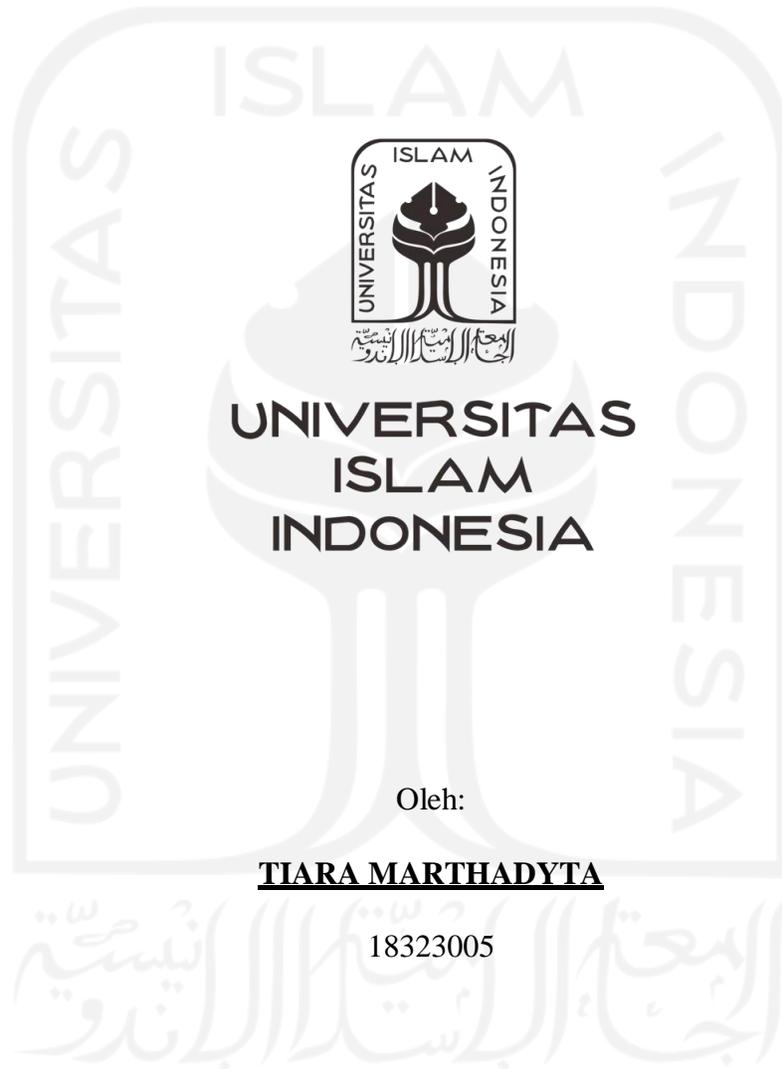


**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM
MENGATASI DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN
DI INDIA PADA TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI



Oleh:

TIARA MARTHADYTA

18323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM
MENGATASI DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN
DI INDIA PADA TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh Derajat Sarjana S1
Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

TIARA MARTHADYTA

18323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Mengatasi
Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan pada Tahun 2014-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int., St., M.A

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.




PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 2 Juni 2022,



Tiara Marthadyta



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
الاستد بالاندية

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Cakupan Penelitian	14
1.5 Tinjauan Pustaka	15
1.6 Kerangka Pemikiran	17
1.7 Argumen Sementara	21
1.8 Metode Penelitian	21
1.8.1 Jenis Penelitian	21
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	21
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	22
1.8.4 Proses Pengumpulan Data	22
1.9 Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
ISU DISKRIMINASI GENDER DI INDIA	24
2.1 Perkembangan UNICEF di India	24
2.2 Isu Diskriminasi Perempuan di India Pada Tahun 2017-2018	28
BAB III	36
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND DALAM MENANGANI DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA	36
3.1 Bantuan Teknis dan Keuangan	37

3.2 Pengawasan dengan Aktor Lain.....	40
3.3 Kerja Sama dengan Aktor Lain	43
3.4 Pengembangan Kapasitas Negara	48
3.4.1 Country Programme Action Plan (CPAP) 2013-2017	50
3.4.2 Program Deepshikha.....	55
BAB IV	58
PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Rekomendasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel

Tabel 1. Tiga Pendekatan Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional.....	19
--	----

Gambar

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Wanita dan Laki-Laki dalam Upah Pekerjaan....	30
Gambar 2. Perbandingan Tingkat Literasi Wanita dan Laki-Laki di India	31
Gambar 3. Partisipasi Wanita di Pemerintahan India	32



DAFTAR SINGKATAN

CPAP	: Country Programme Action Plan
CPMIS	: Child Protection Information Management System
GII	: Gender Inequality Index
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICPS	: Integrated Child Protection Scheme
MNC	: Multinational Corporation
MWCD	: Ministry of Women and Child Development
NGO	: Non-Governmental Organisation
UNDP	: United Nations Development Programme
UNFPA	: United Nations Fund of Population Activities
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UN WOMEN	: United Nations Women

UNIVERSITAS
INDONESIA
الجامعة الإسلامية
الاستد بالاندو

ABSTRAK

India merupakan negara yang sangat peduli akan rendah atau tingginya kasta. Keluarga dengan kasta yang tinggi akan sangat dipandang dibandingkan keluarga dengan kasta yang rendah. Perbandingan kasta inilah juga mempengaruhi perbandingan kasta akan gender. Pengaruh sosial ini tidak mungkin tercipta atau berdiri sendiri tanpa alasan apapun. Diskriminasi gender di India muncul dikarenakan hubungan sosial antar masyarakat yang membuat hal-hal tersebut terjadi. Namun, hal ini juga yang pada akhirnya membuat identitas perempuan tercipta mulai dari mereka lahir bahkan masih berada di dalam rahim. Identitas perempuan yang tercipta ini yang membuat stigma masyarakat pada bayi atau anak perempuan menjadi tidak baik dan bahkan menyebutnya dengan aib. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India dan apa saja hal yang membuat diskriminasi ini terjadi di India dan memiliki jumlah kematian yang meningkat pada tahun 2017 hingga 2018. Yang dimana ini termasuk dalam masalah diskriminasi gender yang terjadi sejak para bayi perempuan itu lahir.

Kata-kata kunci: Perempuan, Diskriminasi Gender, India

ABSTRACT

India is a country that really cares about the low or high caste. Families with high castes will be highly regarded compared to families with low castes. This caste comparison also affects the caste comparison of gender. This social influence cannot be created or stand alone without any reason. Gender discrimination in India arises because of the social relations between people that make these things happen. However, this is also what ultimately makes women's identity created starting from when they are born and even still in the womb. The identity of women created is what makes society stigmatize babies or girls to be bad and even call it a disgrace. This study was conducted to analyze the role of UNICEF in overcoming gender discrimination against women in India and what are the things that make this discrimination occur in India and have an increasing number of deaths from 2017 to 2018 the baby girl was born.

Keywords: Women, Gender Discrimination, India

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebanyakan masyarakat di dunia memberi sambutan yang berbeda atas kelahiran bayi laki-laki dan bayi perempuan. Di beberapa kalangan suku, contohnya kaum perempuan berkumpul untuk menunggu lahirnya seorang bayi. Yang dimana mereka kerap merayakan pesta untuk menyambut lahirnya bayi tersebut ke dunia. Dan contohnya juga dilakukan oleh masyarakat di India. Tingkat kematian bayi perempuan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kematian bayi laki-laki, pernyataan ini dikatakan oleh UNICEF dengan mengutip data pemerintah di India. Penting untuk dipelajari orang tua cenderung tidak mencari cara untuk melakukan pengobatan jika anak perempuan sakit dibandingkan dengan anak laki-laki di India, dan banyaknya bayi perempuan yang meninggal pada bulan pertama kelahiran.

Rata-rata lebih banyak anak perempuan yang meninggal di bawah usia lima tahun. Dari sini, diskriminasi sudah dimulai bahkan ketika mereka lahir. Menurut UNICEF, diskriminasi gender merupakan ketidaksetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memungkinkan untuk terciptanya keadilan yang seimbang. Diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan sudah terjadi dari masa kehidupan yang paling dini, seperti India yang juga banyak melakukan praktik pembunuhan janin muda yang berkelamin perempuan (*foeticide*) dan pembunuhan bayi di bawah umur satu tahun (*infanticide*).

Riset ini dilakukan untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India dan apa saja hal yang membuat

diskriminasi ini terjadi di India dan memiliki jumlah kematian yang meningkat pada tahun 2017 hingga 2018. Yang dimana ini termasuk dalam masalah diskriminasi gender yang terjadi sejak para bayi perempuan itu lahir. Di India sendiri menawarkan perawatan gratis untuk bayi baru lahir namun, fasilitas tersebut 60 persen bayi yang dirawat untuk fasilitas ini adalah bayi laki-laki. Menurut data yang dikumpulkan pada tahun 2017 oleh UNICEF.

Kemajuan negara India sendiri dalam berbagai aspek tidak membuat perbedaan atas gender atau yang biasa disebut dengan ketimpangan sosial dalam gender berkurang maupun hilang. Pada tahun 2017-2018 merupakan tahun yang dimana segala hal mulai memiliki kemajuan, namun tradisi yang dilakukan di India atas perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih sangat jelas terasa. Gambaran bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki masih sangat terlihat mulai dari bayi laki-laki atau perempuan tersebut dilahirkan. Dan hal ini sudah termasuk kekerasan gender yang dialami oleh perempuan. Ketimpangan sosial ini lah yang terjadi antara masyarakat di India. Dalam hubungan sosial, pasti ada sistem kasta. Yang dimana sistem kasta ini pun terjadi juga di India (Mosse, 2007). Antara laki-laki dan perempuan mereka dibatasi atau dibedakan oleh kasta yang mereka miliki. Dan kasta terendah inilah yang dimiliki oleh perempuan yang kerap menjadi sasaran untuk melakukan diskriminasi hingga kekerasan gender.

India merupakan negara yang sangat peduli akan rendah atau tingginya kasta. Keluarga dengan kasta yang tinggi akan sangat dipandang dibandingkan keluarga dengan kasta yang rendah. Perbandingan kasta inilah juga mempengaruhi perbandingan kasta akan gender. Dan ini juga sudah dapat disebut dengan diskriminasi gender yang kerap terjadi pada kaum perempuan. Mulai dari mereka lahir ke dunia

bahkan hingga mereka dewasa masih sangat kerap terjadi. Banyak bentuk diskriminasi yang akhirnya berujung menjadi kekerasan gender yang kita ketahui. Yang kerap terjadi adalah pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan terhadap kaum perempuan, bahkan terhadap seorang ibu yang memiliki bayi atau anak perempuan. Dalam riset ini berfokus terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di India akibat kelahiran bayi perempuan. Yang dipercayai membawa dampak yang buruk untuk keberlangsungan hidup di negara India.

Begitu lahir, kita telah mempelajari peran gender. Sebagai orang dewasa pun kita pasti cenderung mempercayai bahwa kita hidup memiliki kada kebebasan yang signifikan seperti bebas memilih cara kita berperilaku, cara berpikir sampai cara peran gender kita. Salah satu konsekuensi yang membuat posisi perempuan terbatas adalah perkembangan keutamaan anak laki-laki, keutamaan yang amat sangat maju di India. Dan ini sungguh sangat mempengaruhi pemikiran atas jenis kelamin laki-laki dalam populasi. Banyak orangtua di India lebih menyukai anak laki-laki karena norma sosial yang melarang wanita melakukan beragam ritual atau kegiatan yang memiliki sangkut-paut terhadap agama yang dimana sebenarnya diskriminasi ini dianggap ilegal. Dan sering dianggap sebagai beban dikarenakan menyedot sebagian kekayaan keluarga yang bisa berupa mas kawin saat mereka menikah nanti. Dan banyak pemikiran lainnya tentang bagaimana anak perempuan itu. Terlebih di kalangan orang India di kelas menengah yang dimana anak laki-laki sangat diutamakan.

Kekerasan dalam bentuk diskriminasi semacam ini memberikan peluang besar akan terjadinya para ibu akan melakukan aborsi ketika mengetahui bayi yang akan dilahirkannya adalah seorang perempuan. Selain itu, kekerasan menimbulkan rasa

malu dan mengintimidasi para ibu yang akan melahirkan bayi perempuan mereka. Diskriminasi yang dilakukan berdasarkan gender ini pun tak hanya mencegah para bayi perempuan itu untuk dilahirkan, namun menyebabkan ancaman kematian bagi para anak perempuan yang sudah dilahirkan. Ini pun sudah dimuat ke dalam jurnal kesehatan *The Lancet*. Dan kejadian ini kebanyakan ini terjadi di negara bagian Uttar Pradesh, Bihar, Rajashtan dan Madhya Pradesh. Dan mereka yang berada di kawasan pedesaan yang sebagian berpendidikan rendah dan miskin. Dan inilah salah satu yang membuat mereka menginginkan bayi laki-laki. Tindakan sadis ini pun telah dilakukan pada awal 1990-an. Diskriminasi yang berawal sejak dari rahim, berlanjut hingga sepanjang hidup perempuan. Dan India pun menjadi salah satu tempat paling berbahaya bagi perempuan. Yang bisa terjadi di dalam rumah tangga, tempat kerja atau dalam lingkungan sekitar. Terdapat banyak hubungan antar berbagai macam kekerasan yang dilakukan kepada perempuan yang terjadi di seluruh dunia. Mulai dari pemerkosaan, pemukulan hingga pembunuhan yang kerap kita dengar sebagai kekerasan terhadap perempuan (Mosse, 1993).

Pengaruh sosial ini tidak mungkin tercipta atau berdiri sendiri tanpa alasan apapun. Diskriminasi gender di India muncul dikarenakan hubungan sosial antar masyarakat yang membuat hal-hal tersebut terjadi. Namun, hal ini juga yang pada akhirnya membuat identitas perempuan tercipta mulai dari mereka lahir bahkan masih berada di dalam rahim. Identitas perempuan yang tercipta ini yang membuat stigma masyarakat pada bayi atau anak perempuan menjadi tidak baik dan bahkan menyebutnya dengan aib.

Dalam isu ini, tidak sedikit juga bayi atau anak perempuan yang masih diijinkan untuk tetap melanjutkan hidupnya. Namun, diskriminasi yang ada dari dulu ini akan terus terjadi. Bahkan untuk dijadikan alasan para oknum untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa isu ini dapat terjadi, dan bagaimana peran organisasi internasional sendiri mengatasi isu ini. Perlu peran penting dari banyaknya pihak untuk mengurangi bahkan menghilangkan isu ini. Karena pemerintah dari India sendiri tidak bisa mengubah stigma masyarakat India akan hal terkait perbedaan anatara laki-laki dan perempuan. Berhasil atau tidak kebijakan yang dibuat oleh organisasi internasional seperti UNICEF untuk berperan dalam mengatasi isu diskriminasi gender terhadap perempuan yang ada di India, yang dimana pada tahun 2014-2018 memiliki angka kematian yang cukup tinggi bagi bayi dan anak perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender di India tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India pada tahun 2014 – 2018.

1.4 Cakupan Penelitian

Banyak kasus diskriminasi terhadap gender yang terjadi di berbagai belahan dunia. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini hanya membatasi masalah pada bagaimana peran UNICEF dalam menghadapi dan mengatasi kasus diskriminasi

gender terhadap perempuan yang terjadi di India pada tahun 2014-2018. Yang Dalam penelitian ini juga akan meneliti bagaimana bisa diskriminasi gender terhadap perempuan terjadi di India yang dimana memiliki lonjakan angka yang tinggi pada tahun 2017-2018 dengan 240.000 bayi perempuan dengan usia dibawah lima tahun meninggal dunia. Yang dimana pada tahun 2005 hingga 2015, angka kematian bayi perempuan di India sekitar 19 kematian dari 1.000 per harinya selama satu dekade.

1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut yang tertulis dalam artikel jurnal Andrey Shastri yang berjudul “*Gender Inequality and Woman Discrimination*” telah dijelaskan dalam konstitusi di India yang terdiri dari pasal – pasal untuk melarang diskriminasi apapun. Seperti yang tertulis pada Pasal 14 yaitu mempertimbangkan persamaan di mata hukum, pasal 15 yang berisi pelarangan diskriminasi terhadap kasta, ras, jenis kelamin, agama atau tempat lahir, pasal 16 yang berisi persamaan kesempatan kerja pada publik, Undang – Undang Hak Sipil India tahun 1955, *Uniform Civil Code* pasal 44 (Shastri, 2014). Dalam artikel ini dipaparkan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam mengurangi segala bentuk kasus kekerasan pada perempuan. Namun belum dijelaskan apakah itu efektif tidaknya dalam penerapan pemerintah tersebut.

Menurut yang tertulis dalam artikel jurnal yang berjudul “*Peran UN WOMEN dalam Mempengaruhi Kebijakan India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015*)” menjelaskan bahwa kurangnya stabilitas keamanan di India dan sistem patriarki yang dimana sangat menekankan kepada *manpower* yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di India. Serta faktor

kebudayaan yang ada di India yang mempercayai bahwa laki – laki lebih tinggi daripada perempuan (Mareta, 2017).

Menurut yang tertulis dalam artikel jurnal yang berjudul “*Sex Equality Under the Constitution of India Problems, Prospect and Personal Law*” yang ditulis oleh Catherine A. Mac Kinnon dijelaskan bahwa hadirnya ketidaksetaraan sosial yang terjadi pada perempuan yang diakibatkan oleh seks dan diskriminasi. Yang akibatnya banyak perempuan yang disalahgunakan dalam berbagai praktik serta dilanggar haknya dalam berbagai contoh seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan bentuk pelecehan seksual lainnya yang serupa. Kedua artikel diatas tertulis tentang banyaknya faktor – faktor yang menyebabkan diskriminasi di India sampai sekarang masih terus terjadi. Namun belum terlalu dijelaskan bagaimana upaya untuk menghilangkan diskriminasi tersebut terkait pemerintah atau NGO yang berperan di dalamnya. Maka, peneliti akan menulis dan mencari tahu tentang bagaimana upaya untuk mengatasi diskriminasi tersebut dari satu NGO (Kinnon).

Dalam penelitian Fahira Ulfa Mursalin yang berjudul “*Efektivitas Implementasi Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Penurunan Diskriminasi Perempuan di Pakistan*” dijelaskan bagaimana peran dan upaya CEDAW dalam menangani kasus diskriminasi terhadap perempuan. Yang dimana ada undang – undang yang tertulis tentang pembunuhan atas nama kehormatan. Undang – undang yang tertulis pada tahun 2004.

Dalam tulisan skripsi Shinta Hakim yang berjudul “*Proses Advokasi NGO Dalam Penanggulangan Masalah Kekerasan Seksual di India Pasca Kasus Nirbhaya*” yang dimana penelitian ini berisi angka kekerasan yang masih tinggi, kasus

pembunuhan bayi perempuan di India dan aborsi yang dilakukan secara selektif pada calon bayi yang memiliki jenis kelamin perempuan. Yang didalamnya juga tertulis bagaimana peran NGO dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai lembaga kemanusiaan. Berdasarkan kedua penelitian diatas ada letak perbedaan hasil penelitian dengan penulis. Dalam dua penelitian itu tertulis upaya dalam menurunkan angka diskriminasi yang masih tinggi, dan yang akan ditulis oleh penulis adalah bagaimana peran UNICEF dalam menangani kasus diskriminasi di India. Khususnya pada perempuan dan bayi perempuan.

Dari kelima penelitian di atas terdapat perbedaan dari penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada IGO yang digunakan yaitu UNICEF serta peran-peran yang ada juga berbeda, serta upaya-upaya dalam menangani diskriminasi gender ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Konsep Implementasi Kebijakan

Hadirnya organisasi internasional berguna untuk tercapainya suatu tujuan dan segala kepentingan bersama. Organisasi Internasional sendiri sangat memberikan peran penting untuk menanggapi banyaknya permasalahan dunia yang kerap terjadi. Sangat sulit jika Organisasi Internasional tidak dilibatkan dalam beberapa atau bahkan semua kepentingan. Semakin pentingnya Organisasi Internasional memiliki peran, semakin menunjukkan peran mereka sebagai aktor dalam dunia hubungan internasional. Negara semakin mendelegasikan pelaksanaan perjanjian serta kebijakan internasional kepada Organisasi Internasional (Jutta Joachim, 2008). Jutta Joachim menyatakan dalam teori ini bahwa peran yang dimainkan oleh Organisasi Internasional dalam implementasi

yaitu dengan membandingkan berbagai macam organisasi serta berbagai macam bidang kebijakan. Dalam teori ini memiliki tiga pendekatan yang dapat mempengaruhi kemampuan Organisasi Internasional untuk memperkuat kekuatan mereka dalam proses implementasi meliputi (Jutta Joachim B. R., 2008) :

1. *Enforcement Perspective*

Dalam pendekatan ini kebijakan yang ditetapkan oleh suatu Organisasi Internasional terhadap negara anggota, apabila negara anggota tersebut melanggar aturan maka akan diberikan *punishment*. Sehingga, kebijakan tersebut harus selalu di monitoring agar terlihat bagaimana kebijakan itu berjalan dan terpenuhi atau tidak.

2. *Managerial Perspective*

Berbeda dengan *enforcement*, pendekatan ini memiliki basis kerja sama yakni menawarkan bantuan berupa finansial, administrasi ataupun secara teknis. Dimana perspektif ini mengelola kerja sama dengan negara lain atau Organisasi Internasional terkait dan yakin apabila kerja sama tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan terkait.

3. *Normative Perspective*

Selain pendekatan *enforcement* dan *managerial* muncul pendekatan lain yaitu *normative*. Menurut Raustiala dan Victor (1998:681), perspektif ini hanya dijadikan sebagai tambahan apabila 2 pendekatan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal.

Pendekatan ini lebih bertujuan untuk tidak memaksa negara atau mengelola implementasi, yang dimana Organisasi Internasional lebih menggunakan argument yang berusaha untuk meyakinkan negara bahwa memenuhi atau mengikuti komitmen yang telah ditetapkan oleh Organisasi Internasional adalah pilihan yang tepat.

Tabel 1. Tiga Pendekatan Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional

Pendekatan	<i>Enforcement</i>	<i>Managerial</i>	<i>Normative</i>
Sifat	Memaksa	Terbuka dan dapat dikelola	Kepercayaan
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian sanksi yang berupa ekonomi, militer maupun dengan tindakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis dan keuangan • Pengawasan dengan berbagai aktor • Kerja sama dengan berbagai aktor • Membantu negara dalam pengembangan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada otoritas dan legitimasi • Melakukan control terhadap informasi

Dari ketiga perspektif yang telah dijelaskan, peneliti menggunakan *Managerial Perspective* karena dalam penelitian ini membahas tentang peran UNICEF terhadap isu diskriminasi gender yang ada di India melalui kerja sama atau kesepakatan yang ditawarkan antara UNICEF dan negara India. India memberikan jalan bagi UNICEF untuk masuk dan memberikan solusi terkait isu tersebut. Dalam isu ini, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah India dalam upaya menangani diskriminasi gender terhadap perempuan yang kerap terjadi di India.



1.7 Argumen Sementara

Dengan adanya kasus diskriminasi gender di India ini membawa suatu polemik dalam berbagai lapisan Organisasi Internasional. Seperti halnya dengan UNICEF, dalam hal ini sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Organisasi ini untuk bisa membawa perubahan yang tidak mengintimidasi maupun merugikan dari negara anggotanya. Pentingnya UNICEF untuk bisa mengimplementasi hal-hal tersebut karena kekuatan mereka dari segi perspektif *managerial*. Dalam hal ini dibutuhkan 1 perspektif yaitu *managerial perspective*. *Managerial perspective* dapat membantu isu tersebut dikarenakan perspektif ini memiliki basis penawaran bantuan baik dari segi finansial, administrasi, maupun teknis.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan secara deskriptif dan analitikal. Jenis penelitian kualitatif ini digunakan peneliti untuk menjelaskan peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India pada tahun 2014 – 2018. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis yang di dapat dari suatu pengamatan (Tanzeh, 2011).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan diskriminasi gender yang ada di India. Sedangkan,

objek dalam penelitian ini adalah kasus diskriminasi gender terhadap perempuan yang kerap terjadi di India khususnya pada bayi dan anak perempuan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur dimana mengumpulkan data – data melalui artikel jurnal, internet dan media massa, serta kepustakaan untuk sumber informasi terkait peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India pada tahun 2014-2018.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Dalam analisis data, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian bersifat kualitatif. Proses penelitian ini adalah proses yang memberikan deskripsi setiap data hasil penelitian dengan bentuk uraian kalimat. Dari hasil uraian tersebut ditemukan jawaban dari rumusan masalah.

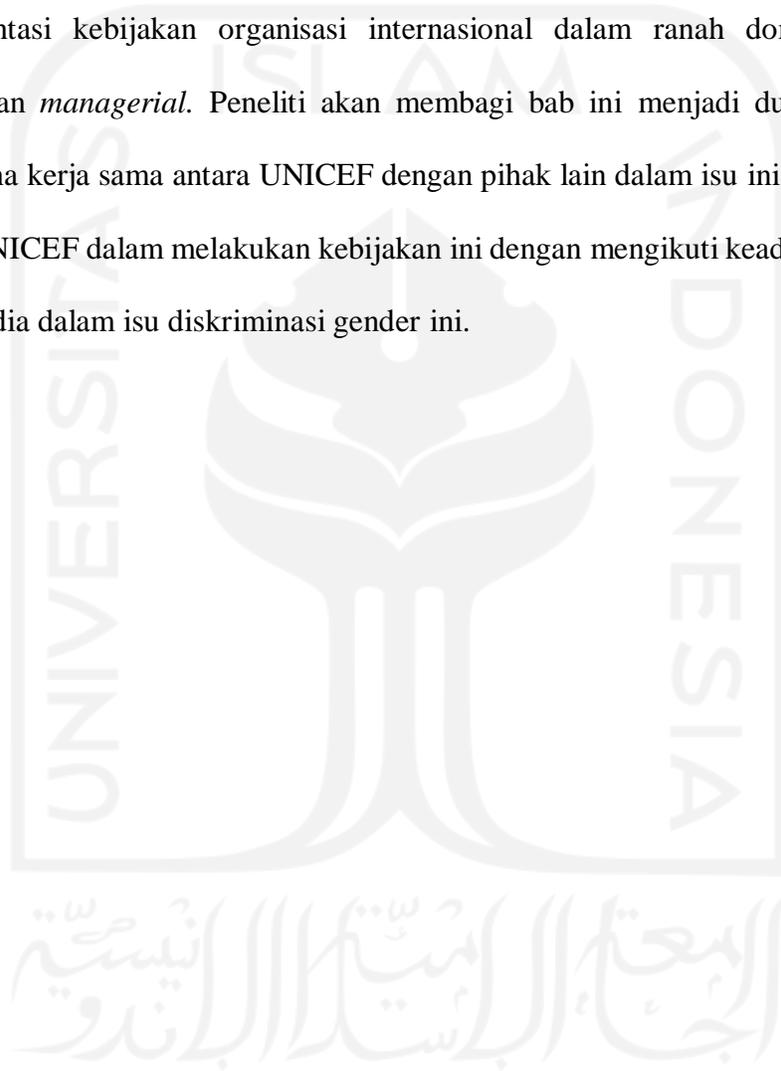
1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India pada tahun 2014-2018. Bab 1 dari penelitian ini akan membahas bagaimana latar belakang, tujuan, signifikansi, cakupan dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Lalu, dilanjutkan dengan pembahasan yang akan dipaparkan pada bab 2 tentang isu diskriminasi gender terhadap perempuan yang ada di India pada 2014-2018. Yang dimana pada tahun tersebut kematian bayi perempuan di India meningkat, apa saja

yang menyebabkan isu ini terjadi, dan apa dampak yang ditimbulkan dari isu ini, serta upaya dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah di India dalam isu ini.

Pada bab 3, peneliti akan menganalisis bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India menggunakan teori implementasi kebijakan organisasi internasional dalam ranah domestik melalui pendekatan *managerial*. Peneliti akan membagi bab ini menjadi dua bagian yaitu bagaimana kerja sama antara UNICEF dengan pihak lain dalam isu ini dan bagaimana upaya UNICEF dalam melakukan kebijakan ini dengan mengikuti keadaan sosial yang ada di India dalam isu diskriminasi gender ini.



BAB II

ISU DISKRIMINASI GENDER DI INDIA

2.1 Perkembangan UNICEF di India

Tahun 1949, UNICEF mulai masuk ke India pada saat anggota dari UNICEF itu sendiri hanya 3 orang dan didirikan di Delhi. Pada tahun 1953, UNICEF memiliki tujuan yang meluas untuk membantu kebutuhan anak-anak yang ada di negara-negara berkembang. Sehingga, harapan untuk memberikan jaminan hidup terhadap anak-anak di negara berkembang juga semakin besar. UNICEF sendiri sudah menjalin kerja sama dengan kurang dan lebih sebanyak 190 negara di dunia, dan salah satu diantaranya termasuk India. Dan pada saat ini, UNICEF memberikan hak-hak kepada para anak-anak di 16 negara bagian di India. Di India sendiri permasalahan tentang hak-hak ini sampai sekarang masih sangat susah untuk ditegakkan. Khususnya pada perempuan, yang dimana anak perempuan sangat dipandang sebelah mata dari para keluarga daripada seorang anak laki-laki.

UNICEF menerima semua keluhan dari permasalahan anak, perempuan serta pernikahan usia dini ke dalam misi mereka. Sehingga, tujuan mereka adalah memberikan pendidikan terhadap anak perempuan dan wanita agar terhindar juga dari segala bentuk kekerasan. Karena menurut UNICEF, jika semakin kecil taraf pendidikan untuk anak perempuan maka semakin besar kemungkinan untuk mereka mendapatkan kekerasan. UNICEF juga dibuat untuk merawat dan menjaga anak-anak dan juga memberi hak untuk perempuan dikarenakan banyaknya diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan.

UNICEF di India pertama kali mengawasi kinerja mereka dengan mendirikan pabrik penisilin untuk obat-obatan dan farmasi. UNICEF menyediakan peralatan yang diperlukan dalam sektor tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan menyetujui perjanjian untuk memberi dana pada pabrik pengolah susu yang ada di India pada tahun 1954. Kinerja UNICEF di India masih terus berlanjut hingga UNICEF menjadi pemasok air di pedesaan yang ada di India dan dilakukan bersama pemerintah India.

UNICEF merupakan organisasi yang selalu mendukung program pemerintah secara terus-menerus untuk mengimplementasikan bagaimana peran mereka sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan kekerasan yang dialami oleh perempuan di India. Yang dimana UNICEF mengutamakan kesetaraan gender di India agar tidak ada kekerasan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat di India. Krisis kesetaraan gender ini yang membuat UNICEF harus mengambil kebijakan untuk India demi menyelamatkan kesejahteraan perempuan yang ada disana. UNICEF mengusahakan banyak program di negara-negara anggota yang menjalin kerja sama dengan UNICEF melalui program-program untuk masyarakat. Dengan identitas UNICEF sebagai organisasi internasional, ini membuat UNICEF semakin ingin memberikan perlindungan yang ketat terhadap anak-anak. Mulai dari laki-laki hingga yang paling krusial yaitu perempuan.

Pada bulan November 1989 diadakan sebuah sidang umum PBB yang dimana dalam sidang tersebut tercantum penetapan Deklarasi Hak Anak yang pada awal pembukaan tertulis "*mankind owes to the child the best it has give*", dan dari sidang umum ini UNICEF ditetapkan menjadi penghubung bagi negara-negara. Dalam sidang umum ini, pembahasan terkait Konvensi Hak Anak ini merupakan hal penting dan

mempunyai pengaruh besar dalam kemajuan kehidupan kemanusiaan. Konvensi ini menetapkan bagaimana perlindungan bagi anak-anak dalam hal pemanfaatan yang tak bertanggung jawab, kelalaian dan penyalahgunaan. Empat prinsip utama yang ditetapkan sebagai prinsip yang dipakai dalam konvensi hak anak tersebut, salah satunya adalah pada prinsip pertama yaitu *non-discrimination* yang dimana tanpa melihat ras, bahasa, warna kulit, agama, sifat, cacat, dan sejenisnya semua anak tetap memiliki hak hidup dan hak mengembangkan apa yang mereka miliki sebagai potensi diri yang ingin mereka kembangkan dengan hak yang sama. Tanpa mendiskriminasi satu sama lain.

UNICEF juga menggunakan istilah perlindungan anak untuk agar dapat melakukan pencegahan dalam hal kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan sejenisnya. Karena hal-hal tersebut yang sering terjadi pada anak-anak yang berada di negara berkembang, penyebabnya dikarenakan lebih memilih gender yang lebih menguntungkan bagi setiap negara tersebut. UNICEF bekerja sama pula dengan pemerintah setiap negara mitra untuk menyetarakan layanan perlindungan anak, tanpa memberi perbedaan terhadap mereka. Dan mendapatkan hak yang sama pula seperti anak-anak lainnya.

Pada tahun 1990, dunia mengalami situasi yang sangat kritis dalam perlindungan anak-anak. Banyak kejadian karena kekerasan yang dialami oleh anak-anak pada saat itu. Anak perempuan yang digunakan sebagai senjata perang di beberapa belahan dunia. Mereka dipaksa untuk ikut serta dalam melakukan hal-hal keji pada masa perang tersebut. Wewenang UNICEF sendiri adalah memberi perlindungan dan jaminan kepada anak-anak di berbagai belahan dunia. meningkatkan

pengembangan anak-anak di dunia juga termasuk dalam wewenang yang dilakukan oleh UNICEF. Wewenang tersebut membuat UNICEF sendiri memiliki visi misi membuat para anak di dunia terjamin kehidupannya dengan tumbuh sehat dan baik dalam segi pendidikan. Berusaha untuk merealisasikan visi misi yang mereka buat tanpa melihat bagaimana latar belakang seorang anak, dimana mereka dilahirkan dan berusaha dalam menjangkau kehidupan anak-anak yang paling rentan untuk mereka bantu dalam kehidupan yang lebih baik. UNICEF merupakan organisasi yang focus terhadap permasalahan anak-anak. Memberikan solusi atas permasalahan anak-anak yang ada di setiap negara. Memberikan jaminan kesehatan yang layak untuk para anak-anak serta perempuan yang ada di dunia pula.

Fungsi dari organisasi internasional ini menyediakan minimal pendidikan dasar yang ada di dunia, terutama di negara berkembang yang masih sangat perlu dalam peningkatan kesejahteraan anak dan juga UNICEF menjunjung kesetaraan gender melalui pemberian pendidikan yang setara bagi anak perempuan, perlindungan dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan yang rentan dialami oleh perempuan. UNICEF juga membantu para anak-anak dan perempuan yang paling krisis membutuhkan pertolongan dalam taraf ukur kemanusiaan yang minim mereka hadapi. Memberikan bantuan-bantuan dalam penyediaan kebutuhan hidup untuk banyak bayi lahir di dunia yang lahir dalam kemiskinan yang terjadi banyak di negara berkembang. Pada tahun 1950, PBB memberi mandat pada UNICEF untuk memberi tanggapan terhadap kebutuhan yang tidak terungkap untuk banyaknya anak yang lahir di negara berkembang yang tak terhitung jumlahnya.

2.2 Isu Diskriminasi Perempuan di India Pada Tahun 2017-2018

Pasca perang dunia ke II, salah satu yang isu yang cukup menarik perhatian adalah isu keprihatinan gender. Yang dimana membahas tentang bagaimana perempuan dan laki-laki tidak setara, walaupun Sebagian hal besar yang mengalami isu tersebut adalah perempuan. Dari semua negara yang memiliki ketidaksetaraan gender, India lah yang paling umum mengalami hal tersebut. India merupakan negara yang masih sangat rentan terjadi pelanggaran HAM pada perempuan. Mulai dari kekerasan pada anak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, dan kasus-kasus eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi di India yang juga termasuk dalam diskriminasi gender pada perempuan. Di India, diskriminasi terhadap perempuan ini kerap terjadi dikarenakan perempuan dianggap menjadi kelemahan dalam keluarga. Di India, fenomena dalam pemilihan jenis kelamin sudah terjadi pada tahun 1980-an, yang di mana dominasi dalam mencari pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan di kota-kota besar yang ada di India dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat akan merasa jauh lebih kaya ketika mereka memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris, sehingga mereka memiliki tekanan untuk lebih memilih jenis kelamin laki-laki dalam memiliki anak. Dasar pemikiran ini yang pada akhirnya memicu diskriminasi gender pada perempuan menjadi lebih berat dan besar.

Alasan utama dalam terjadinya diskriminasi gender yang ada di India ini dikarenakan perempuan dianggap memiliki tanggungan yang besar, dukungan fisik dan keuangan yang berkelanjutan bagi anak perempuan, serta sistem kasta yang ada di India

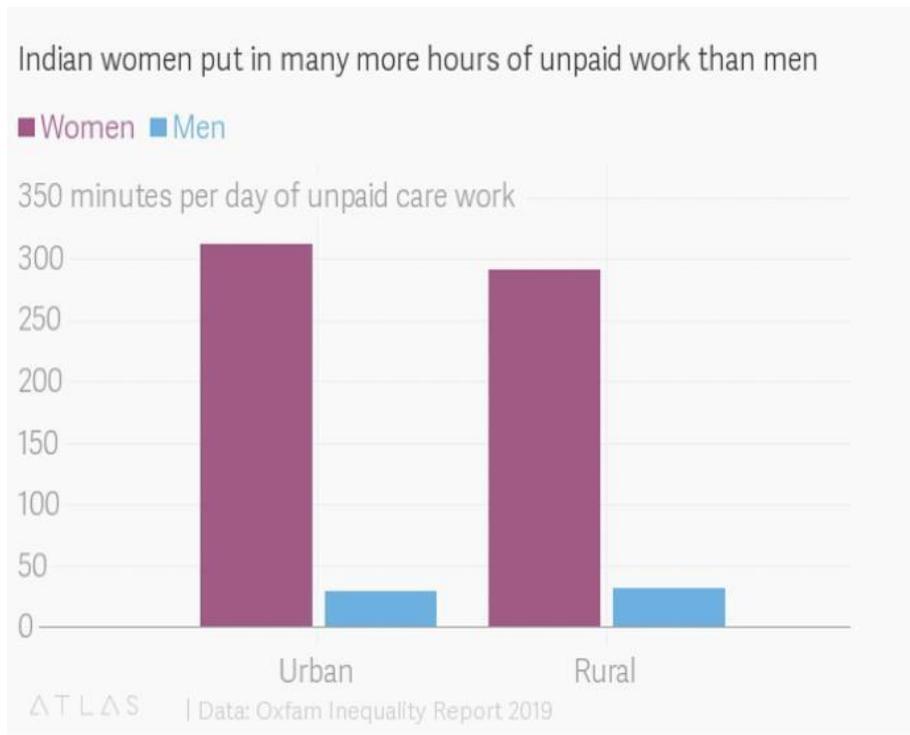
juga menjadi alasan mengapa diskriminasi gender di India masih kerap terjadi. Di berbagai bidang lain yang terjadi, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan ini juga menjadi tempat terjadinya diskriminasi gender di India. Dalam hal pewarisan di India, perempuan juga memiliki jumlah pewarisan yang sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun tidak terlihat secara langsung, namun konstitusi agama di India tidak memberikan perempuan warisan yang sama, ada pemisahan pemberian warisan yang membuat perempuan tidak diberikan jumlah warisan yang sama dengan laki-laki. Walaupun konstitusi agama Islam di India telah mengizinkan perempuan memiliki setidaknya setengah harta dari laki-laki, namun masyarakat di India enggan memberikan harta yang diinginkan kepada perempuan apalagi dalam jumlah yang sama.

India memiliki sistem kasta yang mereka pakai dalam sistem sosial mereka. Yang dimana sistem kasta menandakan tinggi atau rendahnya tempat bagi setiap orang India. Kaum yang berada dalam kasta terendah disebut sebagai kasta tetap, atau biasa disebut dengan kaum harijan. Populasi yang dimiliki oleh kaum harijan cukup minoritas di negara bagian lainnya termasuk di India. Kaum harijan ini merupakan kaum yang paling miskin di India. Perempuan yang berasal dari kaum harijan ini memiliki tanggungan diskriminasi paling besar, ini disebabkan oleh kelas, kasta dan yang paling utama adalah gender. Tak sedikit kaum harijan ini tinggal di kawasan pedesaan, kaum perempuan harijan ini menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan seksual yang sah di kawasan pedesaan. Hingga sekarang, tak sedikit kaum perempuan harijan di India masih harus memperlihatkan dada mereka kepada laki-laki yang memiliki kasta lebih tinggi dibandingkan kasta mereka. Ketidaksetaraan gender dan

berbasis kasta memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan yang ada di masyarakat India tersisih, termasuk dalam bidang ekonomi. Terutama mereka yang berasal dari pedesaan, yang dimana banyak masyarakat pedesaan banyak kekurangan dalam perekonomian. Mereka memiliki banyak kekurangan, mulai dari tempat tinggal yang kumuh, kekurangan gizi, kemiskinan, pernikahan dini, kurangnya fasilitas belajar yang baik.

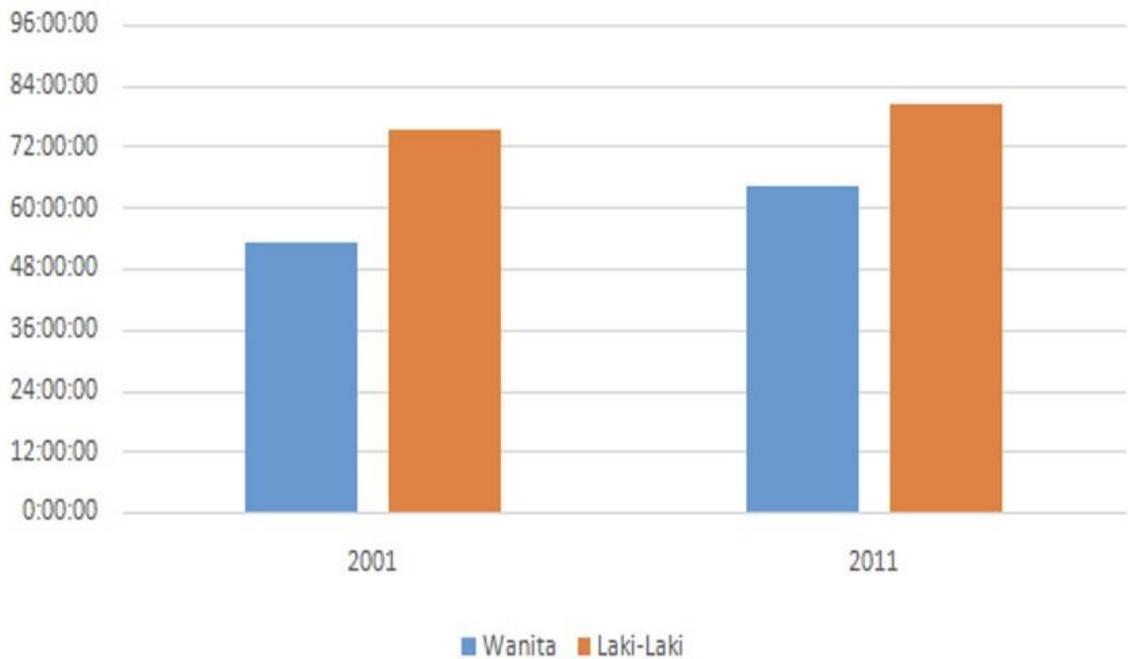
Populasi penduduk di India merupakan populasi terbesar kedua di dunia. Yang dimana ini membuat India memiliki kekuatan ekonomi baru dan terus berkembang cepat. Namun, memiliki kekuatan ekonomi baru tidak membuat India tidak memiliki catatan buruk lainnya. India menjadi negara dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang banyak terjadi pada anak dan perempuan. Meski zaman telah berganti, globalisasi telah terjadi, dan perkembangan dunia sudah jauh lebih modern, namun isu diskriminasi gender ini masih sangat melekat dan mandarah daging di negara India. Karena yang kita ketahui, yang sangat dinilai dan dipercayai oleh masyarakat India yang menempatkan laki-laki di posisi pertama dan perempuan berada di posisi kedua. Banyak tulisan yang menjelaskan betapa sangat kurangnya India dalam kesetaraan gender, yang dimana sangat membandingkan antara perempuan dan laki-laki. Tidak hanya pembatasan akses terhadap perempuan kepada sumber daya serta kesempatan-kesempatan yang ada, namun pembatasan terhadap prospek hidup juga. Perempuan di India hanya boleh memiliki peran yang sangat kecil di India. United Nations Children's Fund (2017) juga menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan konsep dimana laki-laki serta perempuan memiliki hak dan peluang yang sama. Atau disebut setara dalam taraf berkehidupan.

Menurut *Gender Inequality Index* (GII) pada tahun 2018 yang telah dipaparkan oleh UNDP bahwa India menempati urutan ke 122 dalam bangku pemerintahan yang diisi oleh wanita sebanyak 11.7% pada tahun 2010 hingga 2018 wanita yang mengenyam pendidikan hingga sampai pada sekolah menengah atas hanya asekitar 39%, yang di mana sisanya masih didominasi oleh kaum laki-laki. Partisipasi dalam pekerjaan juga masih banyak diduduki oleh laki-laki. Dari paparan angka tersebut juga sudah terlihat bagaimana kesenjangan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Isu diskriminasi gender ini pun sudah meluas ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga partisipasi di luar maupun dalam pemerintahan. Banyak perempuan yang tidak diberi upah saat bekerja dibandingkan laki-laki. Bahkan kaum laki-laki lebih banyak diberikan upah ketika bekerja dibandingkan dengan perempuan. Kemampuan literasi yang sangat berpengaruh di berbagai unsur juga sangat kecil nilainya dimiliki oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.



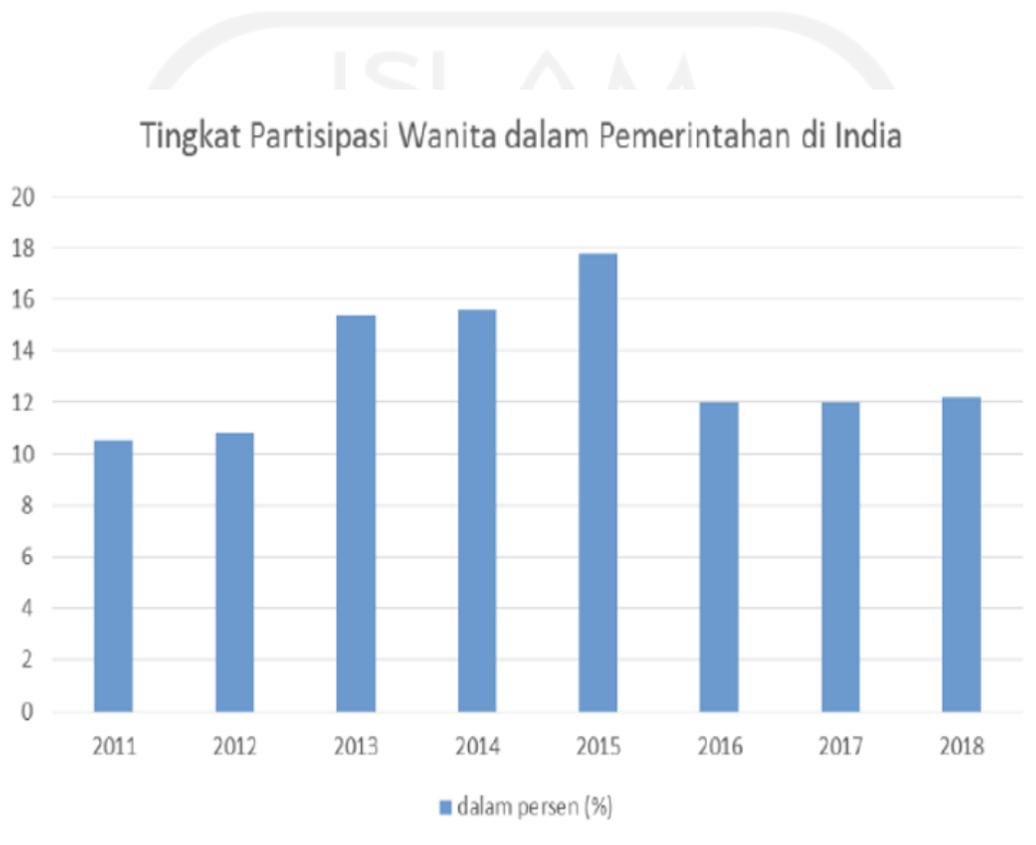
Gambar 2.1 Perbandingan Jumlah Wanita dan Laki-Laki dalam Upah Pekerjaan

Perbandingan Tingkat Literasi Wanita dan Laki-Laki di India



Gambar 2.2 Perbandingan Tingkat Literasi Wanita dan Laki-Laki di India

Sumber: MOSPI Government India, 2018



Tabel 3.3 Partisipasi Wanita di Pemerintahan India

Sumber: MOSPI Government India, 2018

Gender gap yang terjadi di India pada saat pengenyaman pendidikan yang dimana masih dikuasai oleh laki-laki menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan diberbagai sektor. Karena pendidikan merupakan hal penting di setiap taraf kehidupan untuk memiliki prospek hidup yang lebih baik. Rata-rata perempuan di India tidak

memiliki edukasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga tidak dapat memberi perlawanan karena pengetahuan mereka yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (MOSPI, 2018). Dalam kursi pemerintahan di India, perempuan tidak memiliki andil besar dalam mengambil segala keputusan atau kebijakan. Yang dimana jika yang didengar dan yang diutamakan hanya laki-laki maka segala keputusan dan kebijakan hanya menguntungkan laki-laki saja. Karena kebijakan atau keputusan tersebut tidak mengambil sudut pandang dari perempuan. Ini juga yang sangat krusial dalam isu diskriminasi gender di India. *Gender Gap* yang terjadi di India ini juga tidak hanya terjadi di sektor pendidikan atau pemerintahan saja, namun dalam urusan kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan yang dikerjakan di dalam rumah seperti mencuci, memasak, dan sebagainya itu hanya dapat dilakukan oleh perempuan saja. Sedangkan para laki-laki mengerjakan segala aktivitas dan urusan yang berada di luar rumah. Dan pada akhirnya hal ini menyebabkan pemikiran di berbagai bagian dan kawasan di India bahwa laki-laki ada di urutan nomor satu dan wanita berada di urutan kedua (Kassa, 2015).

Isu diskriminasi gender merupakan isu yang sulit sekali dihilangkan di negara India. Yang dimana India masih sangat berurusan dengan masalah tersebut. Budaya dan nilai yang dianut oleh masyarakat India menjadi penyebab penempatan laki-laki masih diatas wanita dan wanita dianggap hanya melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga, sehingga tidak bisa setara dengan para laki-laki. Dan inilah yang membuat gender gap terus terjadi di negara India, dan kebanyakan juga terjadi di negara berkembang lainnya. Negara berkembang seperti India memilih untuk lebih percaya bahwa laki-laki lebih mampu memajukan negaranya dibandingkan

dengan perempuan. Mereka menganggap bahwa perempuan itu lemah dan tidak dapat sekuat dan sebanding dengan laki-laki (D, 2017).

Diambil dari pembukaan konstitusi di India, segala prinsip kesetaraan gender untuk perempuan yang ada di India ini mengakibatkan negara harus mengambil langkah yang cukup tegas agar semua perempuan yang ada di India mendapat perilaku yang adil. Dan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 14 terkait kesetaraan dalam aspek politik, aspek ekonomi serta aspek sosial. Serta Pasal 15 meliputi segala larangan terhadap diskriminasi untuk setiap warga negara dalam aspek ras, agama, kasta dan jenis kelamin. Pemerintah di India telah mengusahakan segala cara untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ada di India, dengan banyak program dan kebijakan yang mereka keluarkan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan.

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND DALAM MENANGANI DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA

Bab ini membahas bagaimana UNICEF menjalankan peran dan fungsinya dalam menangani kasus diskriminasi gender terhadap perempuan yang ada di India menggunakan konsep organisasi internasional. Bab ini berisi tentang analisa lebih dalam bagaimana UNICEF menangani kasus diskriminasi yang terjadi di India pada tahun 2014 hingga 2018. Penulis menemukan dari ketiga pendekatan yang ada dalam konsep implementasi pada organisasi internasional, UNICEF menggunakan pendekatan *managerial* yang dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh UNICEF, negara India, ataupun negara lainnya atas kasus diskriminasi gender yang terjadi di India pada tahun 2014-2018 dan juga melalui pendekatan *normative* yang dimana implementasi kebijakan yang dilaksanakan dipengaruhi oleh keadaan suatu negara tersebut.

Perspektif *managerial* (Jutta Joachim B. R., 2008) adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dari ketiga pendekatan yang ada dalam implementasi kebijakan organisasi internasional. Perspektif ini meyakini bahwa untuk patuh terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dalam skala internasional berasal dari aktor terkait yang memiliki tujuan yang relatif sama. Perspektif ini menegaskan bahwa pengelolaan dan melaksanakan sesuatu secara terbuka

memudahkan dalam implementasi kebijakan ini. Dengan bekerja sama antar aktor ini menjadi hal penting yang ada dalam perspektif ini.

Bab 3 ini menjelaskan dan menganalisis bagian utama dari penelitian ini yaitu bagaimana UNICEF mengimplementasikan perannya sebagai organisasi internasional terhadap kasus-kasus diskriminasi gender terhadap perempuan yang terjadi di India dari perspektif *managerial* yang menekankan terhadap pengelolaan dan kerja sama yang dilakukan oleh organisasi internasional dan perspektif *managerial* yang juga menunjukkan bahwa keadaan dalam negara tersebut seperti apa untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati.

3.1 Bantuan Teknis dan Keuangan

Salah satu yang pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *managerial* yang di mana dalam perspektif *managerial* salah satunya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang digunakan juga memiliki banyak macam, yaitu melakukan pengawasan dengan negara terkait misalnya India harus memberikan laporan-laporan terkait isu diskriminasi gender dalam bentuk dokumen kepada organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam isu tersebut.

Metode dalam bentuk pengawasan yang lain adalah membentuk suatu badan pengawasan yang di mana badan tersebut dapat mengontrol dan mengawasi segala aktivitas negara untuk isu terkait. Badan pengawas tersebut akan memberikan saran-saran kepada negara terkait hal apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan agar tetap memenuhi segala bentuk kerja sama dan perjanjian internasional atau mengirim

perwakilan dari organisasi internasional yang memiliki wewenang tersebut, perwakilan dari UNICEF langsung melihat bagaimana India mengimplementasikan fungsi dan nilai dari UNICEF sendiri.

Metode terakhir dari pengawasan organisasi internasional pada negara adalah menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk ikut melihat bagaimana proses implementasi negara tersebut. Dengan membuat laporan-laporan yang dibuat melalui pembuatan kantor UNICEF yang ada di beberapa bagian di negara India. Seperti pada *Country Programme Action Plan (CPAP) 2013-2017*.

Sejak 2018, ada hal baru bagi anak perempuan di Bihar, sejak adanya kerjamaan sama antara UNICEF dan Pemerintah Negara Bagian Bihar bergabung untuk memperkenalkan program transfer tunai baru – *Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana*, yang diterjemahkan dengan 'Skema Peningkatan Anak Perempuan'. Program ini diluncurkan pada Agustus 2018, dengan 100.000 transfer tunai yang dikirimkan secara elektronik ke rekening bank bersama orang tua-anak (Unicef, 2018). Hal ini tentunya bertujuan untuk menjangkau 16 juta anak perempuan setiap tahun, mengubah seluruh generasi melalui akses universal ke layanan dasar.

Program ini dapat dilihat sebagai bentuk wujud peran UNICEF dalam melakukan kesetaraan gender di India dikarenakan program Transfer tunai membantu memastikan bahwa anak perempuan dapat mendapatkan sertifikat, diimunisasi, mendapatkan pendidikan dan untuk menolak tekanan untuk menikah sebagai anak-anak. Selama ini, laki-laki di India lebih diutamakan dan diprioritaskan di India sehingga program transfer tunai ini dapat membantu kesetaraan gender di masyarakat India bahwa yang dapat mencapai pendidikan tinggi bukan hanya laki-laki saja, tetapi

juga perempuan. Program transfer tunai dan kelulusan adalah instrumen kunci untuk mendorong pendirian usaha non-pertanian di kalangan perempuan. Mekanisme utama untuk penghematan di antara perempuan termasuk peningkatan akses ke rekening bank formal, pengiriman pesan, dan pembentukan kelompok simpan pinjam yang mendorong perempuan untuk menabung. Program ini tentunya berhasil di India karena dapat menghasilkan pendapatan diluar non pertanian (UNICEF, 2021).

Kerja sama dengan pemerintah negara dunia menjadi aspek penting karena tanpa adanya kerja sama tersebut UNICEF tidak dapat menjalankan programnya di India. Dalam pendekatan *managerial*, kerja sama sebagai bentuk pengawasan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para actor internasional. Dalam hal ini UNICEF, bekerja sama dengan pemerintah India dalam bidang sosial, pendidikan, dan hukum (Asmarita, 2015). UNICEF bahkan sebagai organisasi internasional menjadi advokasi untuk memastikan agar anak-anak tersebut mendapatkan haknya sesuai. Dalam hal ini, hal yang dilakukan UNICEF terkait dengan kasus pernikahan di bawah umur adalah mendukung pemerintah India dalam mengimplementasikan peraturan dengan membuat sebuah buku panduan yang dapat dipahami oleh masyarakat mengenai peraturan pernikahan dibawah umur.

Peran organisasi internasional yaitu organisasi sebagai ruang pertemuan bagi para anggotanya, untuk berkumpul bersama dan untuk berdiskusi, berdebat dan bekerja sama untuk tidak menyetujui sebuah hal (Archer dalam Annisa et al, 2019). Hal ini dimasukdkan dengan negara-negara anggota mempunyai hak dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan karena. Selain itu di dalam sebuah organisasi internasional, para anggota-anggotanya berkesempatan untuk meningkatkan sudut pandang dan

sarana mereka dalam sebuah forum yang lebih terbuka (Kusumawardhana & Nur Auliya, 2020). Peran UNICEF dalam hal ini di India terkait dengan diskriminasi perempuan dengan bekerja sama dengan berbagai *stake holder* yang tujuan adalah untuk kesetaraan gender di India. UNICEF menaruh perhatian terkait isu kesetaraan gender dengan beberapa masalah terkait dengan isu perdagangan anak perempuan, isu pernikahan dibawah umur, serta isu mengenai perempuan berhak mendapatkan hal yang layak. Peran UNICEF sebagai organisasi internasional yaitu mengimplementasikan program-program tersebut dengan mendukung serta melakukan berbagai pertimbangan untuk membuat perempuan setara dengan laki-laki.

UNICEF sebagai organisasi internasional ini memberikan bantuan secara teknis maupun secara finansial di India yang mana dapat dilihat sebagai bentuk kesetaraan gender agar perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi di masyarakat. UNICEF tidak hanya sendirian memberikan bantuan dana kepada India dalam kasus-kasus diskriminasi gender yang terjadi di India, tetapi juga ada badan organisasi lain seperti ILO, UNFPA, UN Women, UNDP, WHO yang berjanji dalam meningkatkan investasi untuk mengakhiri berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di India.

3.2 Pengawasan dengan Aktor Lain

UNICEF dalam menangani kasus diskriminasi gender ini melakukan pengawasan bersama aktor lain termasuk pengawasan dengan pemerintah India. Pemerintah India juga membantu dengan pembuatan laporan terhadap UNICEF dalam banyaknya angka kematian bayi perempuan ataupun bentuk diskriminasi terhadap

perempuan yang terjadi pada tahun 2017-2018 ini. Dalam setiap kasus diskriminasi yang dialami oleh anak perempuan dan perempuan harus dilakukan dengan identifikasi korban. Dan juga mengenali para perempuan mengapa mereka memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi korban diskriminasi gender ini. Dalam kasus diskriminasi gender ini tidak hanya melibatkan UNICEF saja namun juga banyak melibatkan kementerian lainnya dikarenakan diskriminasi yang terjadi ini banyak terjadi pada perempuan dengan usia dibawah umur, yang dimana mereka masih dibawah banyak pengawasan badan terkait.

UNICEF juga melakukan pengawasan bersama UN WOMEN yang di mana UN WOMEN sendiri memiliki fokus pada isu yang sama dalam diskriminasi gender dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India. Selain pengawasan dan upaya lain yang dilakukan oleh UNICEF. Program pengawasan yang dibuat antara UN WOMEN dan UNICEF juga memiliki tujuan yang sama untuk isu-isu diskriminasi gender di India. Dengan begitu, pemerintah India juga dengan mudah memberikan laporan pengawasan kepada organisasi internasional tersebut. Pedoman dari UN WOMEN itu sendiri adalah melindungi serta menyebarkan hak-hak para perempuan yang ada di seluruh dunia yang dimana para perempuan tersebut termasuk para anak perempuan dan remaja perempuan. Yang dimana mereka menegakkan bahwa secara universal pun hak perempuan dan laki-laki itu sama, terlepas dari segala pertimbangan yang ada di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya. UN WOMEN sendiri selalu memastikan bahwa isu kesetaraan gender tetap menjadi perhatian yang paling pertama dan khusus. Karena, selama berpuluh-puluh tahun PBB

sendiri juga telah menunjukkan kemajuan atas peningkatan kesetaraan gender. UN WOMEN sendiri juga telah tersebar di 168 negara yang ada di belahan dunia.

Pemerintah India yang dianggap belum mampu untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan gender di negaranya sehingga melakukan kerja sama dengan UN WOMEN yang tujuannya untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan. Upaya yang dilakukan UN WOMEN ini tidak hanya melakukan pengawasan saja, tetapi juga melakukan berbagai program seperti Safe Cities dan Ring The Bell Bajo pada tahun 2017 yang mana untuk mendorong agar individu terlibat dalam kasus ketidakadilan gender. Dalam program ini memberikan perempuan dana tabungan dapat meningkatkan kesejahteraan pada perempuan itu sendiri. Salah satu kontribusi yang dilakukan UN WOMEN dalam isu ketidaksetaraan gender ini adalah memastikan bahwa setiap perempuan India dapat berpartisipasi secara aktif dalam aspek politik untuk mampu mengeluarkan pendapat mereka. Dalam upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di India, pemerintah India melakukan penerapan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Selain itu, UN WOMEN juga memiliki salah satu program kerja terkait dengan kampanye *16 Days of Activism* di tahun 2018 yang diperingati menjelang hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini sebagai bentuk dukungan untuk mengakhiri berbagai bentuk kekerasan seksual pada perempuan karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam hal ini, UNICEF tidak hanya bekerja sama dengan UN Women saja, tetapi juga melakukan upaya untuk melihat hambatan-hambatan yang terkait gender yang menghambat

kemajuan bagi anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan, dan memberdayakan mereka untuk hidup dengan potensi penuh mereka.

Selain dengan UN WOMEN ataupun pemerintah India, adanya NGO dari India sendiri yang juga berperan dalam isu diskriminasi gender di India. Salah satunya CARE International yang dimana mulai beroperasi pada tahun 2008 dengan menegakkan pola kesetaraan gender, dan pada tahun 2015 CARE berhasil mengajak masyarakat untuk terbuka akan kesetaraan gender. Program yang dilaksanakan juga beragam mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang telah memberi dampak yang besar terhadap perempuan yang ada di India. CARE juga sangat peduli akan diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang sudah terjadi cukup lama. Dan pada tahun 2016 hingga 2019, CARE sudah memberikan kontribusi dan juga dampak pada 130 juta orang yang dalam angka 62 persen merupakan perempuan dan anak perempuan.

3.3 Kerja Sama dengan Aktor Lain

Dalam hal ini UNICEF sebagai organisasi internasional tidak hanya melakukan kerja sama ke negara-negara saja, tetapi juga melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi internasional lainnya. Hal ini mendorong kepercayaan pemerintah negara di dunia untuk percaya pada UNICEF dalam menjalankan programnya. Dengan memegang teguh pada Konvensi Hak Anak, UNICEF diberikan kepercayaan oleh PBB dalam melaksanakan kinerjanya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam penanganan permasalahan dan pemenuhan hak anak di dunia. UNICEF bekerja sama dengan berbagai perusahaan di berbagai bidang. Sementara mitra organisasi masyarakat sipil

UNICEF yaitu organisasi non-pemerintah internasional dan nasional, organisasi berbasis masyarakat, organisasi gerakan sosial.

Program yang dilakukan UNICEF ini dapat berjalan dengan baik salah satunya dengan membangun hubungan eksternal. Dalam hal ini, pemerintah India dapat memberikan kepercayaannya kepada UNICEF dalam menjalankan program terkait dengan kesetaraan gender dikarenakan berbagai faktor salah satunya adalah melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan di sektor publik dan swasta. Keberadaan UNICEF di India pada dasarnya telah membantu India dalam pemenuhan hak anak melalui beberapa upaya yang dilakukan dengan berfokus pada pencegahan dan memiliki dampak untuk jangka panjang kedepannya dalam menangani kesetaraan gender di India (Alfonita, 2018).

Hubungan Eksternal yang dibangun oleh india dapat dilihat dengan kerja sama dengan Barclays dan UNICEF bergabung untuk meluncurkan membangun masa depan muda sejak di tahun 2008. Program tiga tahun bertujuan untuk memberdayakan ribuan orang muda di enam negara termasuk India, dengan memberikan dukungan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mencapai masa depan ekonomi yang lebih cerah bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Di India, kemitraan ini membantu ribuan gadis dan wanita muda di negara bagian Maharashtra.

Ini menghargai harga diri mereka dan memberdayakan mereka untuk memiliki mata pencaharian yang sejahtera dan berkelanjutan, memberi manfaat bagi semua masyarakat (Showkat, 2017). UNICEF juga bekerja sama dengan perusahaan Johnson & Johnson's "*Stayfree Women for Change*" dan UNICEF menjalin kemitraan untuk mempromosikan praktik kesehatan dan kebersihan di antara gadis remaja di India,

memberi manfaat kepada lebih dari 500.000 perempuan. Tidak hanya itu, UNICEF juga bekerja sama dengan Delhi Daredevils & 'Berani Peduli' Dengan tujuan untuk melindungi jutaan gadis remaja yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan karena usia dan jenis kelamin mereka, UNICEF India dan Delhi Daredevils bergandengan tangan untuk memberdayakan gadis-gadis tersebut di India (Showkat, 2017). Hubungan eksternal dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan organisasi dapat dilihat sebagai pendekatan managerial karena dalam hal ini UNICEF harus memberikan laporan-laporan terkait dengan kegiatan dan program sehingga didalamnya terdapat perjanjian kerja sama.

UNICEF sebagai organisasi internasional membangun kerja sama dengan berbagai MNC, NGO, dan organisasi lainnya. Hal ini dikarenakan dengan membangun hubungan secara eksternal dapat membantu UNICEF dalam mengatasi sebuah permasalahan dengan komprehensif. Tidak hanya membangun hubungan eksternal, tetapi UNICEF sendiri sudah memiliki tujuan yang jelas salah satunya adalah memperjuangkan hak anak-anak. Dalam program yang dijalankan juga memiliki struktur yang jelas. Hal ini sejalan dengan karakteristik organisasi internasional yaitu organisasi internasional dapat dikatakan sebuah organisasi apabila memiliki keanggotaan, tujuan, dan struktur yang memadai (Clive, n.d.). Dalam hal ini, UNICEF telah memenuhi ketiga karakteristik tersebut. Selain itu, UNICEF merupakan organisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai global membership and limited purpose organization karena keanggotaan UNICEF tidak dibatasi namun memiliki tujuan yang spesifik dalam menangani permasalahan terkait hak anak.

Dalam hal ini untuk mengatasi diskriminasi gender di India, UNICEF tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah India saja, tetapi juga seperti yang dijelaskan di subbab sebelumnya bahwa pemerintah India ini juga melakukan kerja sama dengan UN WOMEN dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India. Kerja sama yang dilakukan antara pemerintah India dengan UNICEF ini bertujuan agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masalah yang terjadi di negara India itu sendiri. Dalam hal ini, UNICEF juga bekerja sama dengan mitra lainnya di tingkat nasional, tingkat negara bagian maupun wilayah persatuan. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah yang dilakukan adalah memperluas kerja sama UNICEF dengan pemerintah di seluruh negara bagian dan segala sektor terkait perdagangan anak. *Ministry of Woman and Child Development* (MWCD) merupakan mitra kerja UNICEF yang utama dalam menangani permasalahan yang terkait dalam pelanggaran hak asasi terhadap anak dan perempuan (UNICEF, 2018).

Pada tahun 2017, kerja sama dengan Kementrian dilakukan untuk isu perdagangan anak. Program pemberdayaan remaja dan penguatan sistem Integrated Child protection Schem (ICPS) tetap berlanjut, hingga pada akhirnya terdapat 420 rumah remaja yang didanai dibawah ICPS, dimana ada sekitar 316 rumah observasi, 39 rumah khusus, 54 rumah observasi khusus, dan 11 ruang aman untuk para remaja dalam masa rehabilitasi dan pengembangan kapasitas remaja melalui diskusi mengenai isu-isu perlindungan anak (Ministry of Women and Child Development, 2017). Dalam hal ini, UNICEF juga memberikan dukungan kepada pemerintah India dalam kontribusi untuk mengurangi pekerja anak dengan memperkuat struktur perlindungan anak sehingga memadai dari eksploitasi dan pelecehan. Hal ini bertujuan agar kualitas

Pendidikan di India mengalami peningkatan sehingga dapat mendorong kesadaran keluarga mengenai perkawinan anak. Hal ini ditulis dalam dokumen *Schem Guideliness* yang ada dalam ICPS tersebut yang dimana Ministry of Women and Child Development membantu dan juga berkerja sama dengan UNICEF dalam program ICPS (Development, 2017). Dokumen tersebut bernama *Revised Integrated Child Protection Scheme*.

Adapun kerja sama yang dilakukan pada tahun 2017 yaitu di Assam dan Tamil Nadu, CPMIS online diluncurkan dan semua pejabat terkait di tingkat negara bagian dan distrik menerima pelatihan. Di Bihar, UP, Bengal Barat, Jharkhand, MP, dan Karnataka hal serupa sedang berada pada tahap pengembangan. Dalam peran UNICEF di tahun 2017-2018 di India ini sangat terlihat dari kerja sama dengan pemerintah India untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi dan praktik berbahaya di berbagai tingkatan mulai dari memperkuat kapasitas pekerja sosial garis depan hingga membangun sistem, pengetahuan dan pengumpulan bukti, dan memajukan kesepakatan tentang hak-hak anak terkait perlindungan. Hal ini dikarenakan sebelumnya banyak anak India yang melahirkan seorang anak yang kemudian meninggal dan juga meningkatnya pernikahan anak.

Dalam 10 tahun terakhir, di India, kemajuan telah berarti bahwa risiko seorang gadis menikah sebelum dia berusia 18 tahun telah turun dari hampir 50 persen menjadi 30 persen. Alasan pergeseran tingkat prevalensi termasuk: investasi pemerintah proaktif pada remaja putri, meningkatnya tingkat pendidikan anak perempuan, dan masyarakat yang kuat mengenai pesan seputar ilegalitas pernikahan anak dan merugikan yang ditimbulkannya.

3.4 Pengembangan Kapasitas Negara

Dalam kasus diskriminasi gender yang ada di India sendiri, perlu adanya peran dari negara India tersebut. Yang dimana sebagai sebuah negara perlu adanya hal-hal yang dikembangkan dalam menaikkan porsi kapasitas negara tersebut, khususnya dalam isu ini. Banyak yang dapat dimulai untuk mengembangkan suatu kapasitas negara, bisa dimulai dengan struktur pendidikan, struktur sosial, struktur perbaikan ekonomi atau pengembangan hukum yang harus dilakukan. Selain itu, pengaruh masyarakat merupakan andil besar dalam pengembangan kapasitas suatu negara. Dalam kasus diskriminasi gender di India sendiri pengaruh masyarakat membuat diskriminasi gender semakin terjadi, karena masyarakat disana yang memiliki stigma bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda. Yang dalam hasilnya nanti akan berdampak terhadap perbaikan isu tersebut. Pendidikan sendiri merupakan proses penyiapan generasi yang dimana tujuannya untuk memenuhi tujuan kehidupan secara efektif. Terlebih peran UNICEF sendiri juga harus mampu membantu mengembangkan kapasitas negara. UNICEF sendiri berpengaruh untuk India melalui program-programnya, seperti memberi edukasi terhadap masyarakat di India bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Agar tidak ada lagi penilaian sebelah mata terhadap perempuan dan kasta yang dimiliki oleh masyarakat di India. Pemerintah India bersama UNICEF ingin memberikan pengetahuan lebih bahwa memiliki anak perempuan bukanlah sebuah aib keluarga. Karena dari isu ini masyarakat India sangat memiliki pengaruh besar dan menjadi salah satu faktor penyebab isu ini terjadi.

Tidak hanya itu, salah satu akar permasalahan yang ada di India adalah masalah ekonomi sehingga marak terjadinya perdagangan anak. Dalam hal ini, masyarakat India yang cenderung memiliki ekonomi yang kurang baik, tetapi kurang memberikan akses pada perempuan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan banyak difokuskan kepada laki-laki. Hal ini mengakibatkan diskriminasi gender pada perempuan semakin mengalami peningkatan. Dengan memarjinalkan posisi perempuan dan memprioritaskan sehari-hari tentunya terjadi karena faktor budaya karena adanya budaya patriarki yang masih melekat di India (Roy & Chaman, 2017). Keterbatasan perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dalam lingkup pekerjaan serta laki-laki yang selalu dianggap sebagai berada diatas perempuan menjadikan hal tersebut terus terbentuk dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas negara yang perlu dilakukan India adalah memberikan edukasi bahwa posisi perempuan maupun laki-laki adalah setara dan pemerintah India perlu untuk membuka lapangan pekerjaan yang tidak diskriminasi gender sehingga perempuan maupun laki-laki dapat mengakses hal tersebut.

Dampak isu diskriminasi gender terhadap perempuan yang terjadi di India ini sangat besar. Karena juga mengurangi kesempatan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa dari laki-laki maupun perempuan. Pengembangan negara juga harus melalui perekonomian yang tercukupi, sehingga tidak ada lagi perasaan bahwa memiliki anak perempuan itu hanya menambah beban dan mengeluarkan biaya banyak. India juga harus memberikan pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki dan perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam hal apapun. Anak perempuan juga dapat membantu perekonomian keluarga dikarenakan

telah diberi kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Pendidikan yang setara akan memberikan dampak ke semua hal. Dari sosial hingga perekonomian akan berdampak jika negara India memberikan kesempatan pendidikan yang sama terhadap anak perempuan yang ada di India. Selain itu, di tahun 2017 dalam upaya pengembangan kapasitas UNICEF bekerja sama dengan guru, syura manajemen sekolah (konsultatif dewan), tokoh agama dan pengawas akademik. Ghana meluncurkan Suplementasi Tablet Folat Besi Anak Perempuan program pada bulan Oktober 2017, yang bertujuan untuk mencakup fase pertama empat dari sepuluh wilayah, mencapai 600.000 remaja putri berusia 10–19 tahun setiap minggu melalui sekolah dan fasilitas kesehatan.

3.4.1 Country Programme Action Plan (CPAP) 2013-2017

Pada tahun 2012, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah India untuk mengeluarkan *Country Programme Action Plan (CPAP)* dengan rentang waktu pada tahun 2013-2017. CPAP didasarkan pada Dokumen Program Negara 2013-2017 yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif pada September 2012. Hal ini bertujuan untuk memajukan hak-hak para anak perempuan dengan melakukan implementasi program child protection yang ada di dalam Country Programme Action Plan (CPAP) yang bertujuan untuk memenuhi segala hak anak perempuan untuk bertahan hidup, berpartisipasi dan perlindungan untuk mengurangi ketidakadilan yang didasari oleh perbedaan kasta, etnis dan gender, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak perempuan. Dalam Country Programme Action Plan (CPAP) ini tertulis bahwa India menempati peringkat 129 dari 146 negara dalam ketidaksetaraan gender menurut UNDP. Banyak data mengkonfirmasi juga bahwa perempuan memiliki kontrol terbatas

atas sumber daya ekonomi, kebebasan bergerak dan otoritas pengambilan keputusan. Sehingga membatasi kemampuan mereka untuk membuat pilihan hidup yang strategis, ini mandarah daging hingga para perempuan juga memiliki anak perempuan. Salah satu ekspresi paling mendasar dari ketidaksetaraan gender di India adalah preferensi untuk anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal ini dimanifestasikan dalam praktik perawatan kesehatan dan pemberian makan anak-anak, dan juga dalam praktik pemilihan jenis kelamin. Kesenjangan dalam preferensi anak laki-laki sangat lebar.

Ketidaksetaraan gender di India juga dapat dilihat dengan kasus perdagangan anak perempuan di India. Dalam hal ini, UNICEF berperan untuk mencegah terjadinya hal tersebut melalui Country Programme Action Plan (CPAP). Program yang telah dijalankan oleh pemerintah dan UNICEF telah membuat pikiran publik terbuka bahwa perdagangan anak perempuan adalah kejahatan sosial diantara orang-orang (Chania & Moenir, 2021). UNICEF hadir di India bertindak sebagai penasihat untuk pemerintah dan sebagai wadah untuk mendidik dan mensosialisasikan nilai kemanusiaan kepada masyarakat dalam menegakkan keadilan. UNICEF memainkan perannya dalam mendukung kebijakan pemerintah dan mengadopsi pendekatan berbasis kemanusiaan dengan menggunakan strategi. Dalam mencapai tujuan tersebut, UNICEF mengambil peran penting dalam mentransmisikan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam membangun pemikiran masyarakat India.

Sebelumnya pemerintah India dan UNICEF berjalan masing-masing dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan di India, tetapi pada kesempatan ini pemerintah dan UNICEF mengambil sebuah kebijakan dalam Country Programme Action Plan 2013-2017 yang diambil alih oleh UNICEF dengan tujuan untuk mencegah

perdagangan anak perempuan di India. Masa kanak-kanak menjadi salah satu hal terpenting untuk menciptakan generasi yang cemerlang, maka dari itu pemerintah India membuat beberapa kebijakan untuk memerangi kasus ini. Dalam pendekatan managerial ini, UNICEF berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan, yang telah memengaruhi masyarakat internasional. Namun fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, tetapi dapat memengaruhi lingkungan domestik. Pendekatan utama yang dilakukan UNICEF adalah untuk mengurangi kerentanan anak-anak di daerah yang ditunjuk untuk menghilangkan segala bentuk perdagangan anak (UNICEF, www.unicef.org, 2006).

Program dalam Country Programme Action Plan (CPAP) ada banyak sekali. Pada tahun 2016, UNICEF dan UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) mulai melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* untuk program bersama mengakhiri pernikahan anak. Dalam melancarkan program tersebut, UNICEF bekerja sama dengan kementerian Panchayati Raj (lembaga yang berada di desa), Kementerian Pemuda dan Komisi Nasional untuk Perlindungan Hak Anak. UNICEF terus mendukung dan melakukan pemetaan terkait dengan bahan-bahan komunikasi dan pengembangan kapasitas yang sedang berlangsung mengenai pernikahan anak, kekerasan terhadap anak-anak dan pekerja anak yang akan membantu mengidentifikasi kesenjangan dan peluang terkait dengan materi komunikasi.

UNICEF bekerja sama dengan UNDP yang tujuannya untuk membantu memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan lebih baik dan menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara. UNDP akan terus mendukung inisiatif yang membantu mengatasi

ketidaksetaraan yang terus berlanjut dihadapi oleh masyarakat. Dalam program Country Programme Action Plan (CPAP) ini juga dilakukan strategi untuk mempromosikan pendidikan kesehatan reproduksi seksual berbasis keterampilan yang peka terhadap gender. Dalam hal ini, agenda kesehatan yang dilakukan ke remaja di berbagai pendidikan sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender di India.

Misi UNICEF adalah untuk mengembangkan anak perempuan dan wanita, meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak dan membebaskan dari tindak kekerasan. Misi ini akan gagal jika banyak anak di dunia melakukan pernikahan. Menghapuskan pernikahan anak merupakan prioritas dari UNICEF itu sendiri. Dalam hal ini, UNICEF terus-menerus mendukung pemerintah melalui berbagai program salah satunya program Country Programme Action Plan (CPAP). UNICEF bekerja sama dengan para menteri untuk mendukung strategi pencegahan pernikahan anak. Hal ini sesuai dengan peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki fungsi normative yang berkaitan dengan UNICEF mendukung berbagai kebijakan penegakan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Dalam kasus diskriminasi terhadap perempuan di India, peran negara tidak cukup untuk menangani masalah ini dikarenakan harus memiliki program dengan memperhatikan berbagai aspek. UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam memberikan solusi terhadap diskriminasi perempuan di India. UNICEF membantu India dalam mengatasi isu kesetaraan gender dengan memberikan berbagai program. Dalam hal ini UNICEF berperan untuk menganalisis masalah yang tidak mampu diatasi oleh negara India dan berusaha untuk

memberikan solusi kepada negara tersebut. Solusi yang diberikan UNICEF diberikan dalam berbagai bentuk seperti pembiayaan dana serta program-program pelatihan dan edukasi.

Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam melakukan penanganan terkait dengan memperjuangkan hak anak. Apabila dilihat secara keseluruhan bahwa program CPAP ini merujuk kepada pembenahan sistem atau bagaimana sistem tersebut bekerja. Program ini hasilnya belum signifikan sesuai dengan apa yang diharapkan karena data data yang didapatkan bahwa masih mengalami peningkatan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu argumentasi program tersebut tidak berjalan secara signifikan. Keberhasilan UNICEF sebagai organisasi internasional dapat dilihat melalui program transfer tunai yang sangat membantu para perempuan untuk dapat melanjutkan pendidikan.

Upaya yang dilakukan UNICEF dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India dengan melakukan berbagai program untuk memberikan harapan dan memutus diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang dilakukan UNICEF meskipun sebagian besar fokus pada anak, tetapi sangat memberikan dampak yang signifikan kepada perempuan. Dalam hal ini, UNICEF tidak hanya berpartisipasi dengan bekerja sama untuk mengatasi diskriminasi perempuan di India, tetapi juga melakukan berbagai program yang didalamnya memiliki berbagai pelatihan untuk perempuan untuk tumbuh mandiri serta pembiayaan secara finansial dan juga memberikan edukasi perempuan terkait dengan bahaya menikah dibawah umur. Upaya yang dilakukan UNICEF dilakukan untuk kesetaraan gender di India dikarenakan perempuan tidak memiliki akses yang sama dalam konteks pendidikan ataupun konteks

lainnya. Bersamaan dengan program yang dijalankan, UNICEF berusaha untuk memperkuat dengan melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder.

3.4.2 Program Deepshikha

Dari 2014 hingga 2017, UNICEF dan mitra membuat kemajuan substansial dalam mengakhiri pernikahan anak, memajukan pendidikan menengah anak perempuan, mempromosikan kesehatan remaja yang responsif gender dan menangani kekerasan berbasis gender dalam keadaan darurat. Ini adalah prioritas dari Rencana Aksi Gender UNICEF pertama, yang memperhatikan bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang saling terkait yang dihadapi oleh remaja perempuan dan membantu mengkatalisasi investasi dan tindakan global dan lokal (Parmley, 2000). Pada tahun 2017, 64 program negara UNICEF membuat prioritas untuk mengakhiri perkawinan anak. Hal ini membuat pendidikan menjadi alternatif untuk dapat mengakhiri pernikahan anak dibawah umur. Dalam hal ini, UNICEF sebagai organisasi internasional melakukan strategi multisektoral untuk mempromosikan pendidikan menengah untuk anak perempuan pada tahun 2017. Strategi ini termasuk mengatasi kekerasan berbasis gender di sekolah, mendukung pembangunan fasilitas sanitasi ramah perempuan di 50.000 sekolah dan mengadvokasi reformasi kurikulum untuk kesetaraan gender.

UNICEF berperan dalam meratifikasi peraturan hak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk meratifikasi aturan Hak mendapatkan Pendidikan. UNICEF bekerja sama dengan negara dan mengambil peran dalam mendukung pembangunan girls club untuk melatih

anak perempuan agar mengetahui haknya dan memberikan dialog mengenai bahaya pernikahan anak. UNICEF India yang bekerja di negara bagian Maharashtra membuat Deepshikha program yang memberikan pelayanan sosial berupa pengetahuan mengenai bahaya pernikahan di bawah umur. Program ini menjadi sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya ketidaksetaraan gender sehingga perempuan perlu diedukasi mengenai bahaya pernikahan dibawah umur. Meski di India, pernikahan dibawah umur bukan menjadi hal yang tabu, tetapi UNICEF dalam hal ini berperan untuk membantu dalam kesetaraan gender sehingga perempuan maupun laki-laki tidak mengalami diskriminasi. Tidak hanya itu, dalam program ini juga diajarkan sebuah pengetahuan mengenai untuk menyimpan uang secara berkala sehingga perempuan dapat membiayai dirinya mereka ini.

Dalam program Deepshikha ini sudah mencapai lebih dari 50.000 anak perempuan di daerah Maharashtra. Sejak tahun 2008, 280 pernikahan sudah dicegah dan 1003 anak perempuan sudah kembali melanjutkan pendidikan mereka (Asmarita, 2015). Apabila dilihat lebih lanjut bahwa, program ini sebagai bentuk pendekatan managerial karena UNICEF menjalankan program ini dengan baik yaitu berupaya untuk mengkampanyekan kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dibawah umur. Program Deepshikha ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat sehingga perempuan tidak mengalami diskriminasi di masyarakat. UNICEF dalam hal ini sebagai organisasi internasional mengadakan program Deepshikha ini untuk perempuan mengalami perkembangan sehingga melakukan edukasi mengenai bahayanya pernikahan dini.

Program Deepshikha ini dilakukan dengan alasan bahwa ada 1,2 miliar remaja di dunia, 242 juta di India. Sekitar 25% dari mereka menganggur karena tidak memiliki kapasitas atau keterampilan. Dengan maraknya diskriminasi sosial, kondisi perempuan di usia ini masih lebih buruk. Aspek diskriminatif tersebut langsung disikapi Deepshikha dengan melibatkan masyarakat setempat. Program Deepshikha ini menyentuh banyak kehidupan perempuan di India karena memberikan inspirasi kepada perempuan untuk menjaga hidupnya tetap terkendali dan menjadi manusia yang lebih baik. Program ini dapat dilihat sebagai bentuk pendekatan managerial karena pendekatan ini mengacu terkait dengan implementasi sebuah bantuan baik secara finansial maupun non finansial. Namun, UNICEF sendiri menggunakan berbagai argumentasinya untuk dapat meyakinkan negara bahwa memenuhi atau mengikuti komitmen yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional terkait dengan program Deepshikha. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi UNICEF dalam menjalankan program ini. Hal ini dapat dilihat dari reputasi UNICEF sebagai organisasi internasional yang sudah banyak membantu negara-negara di dunia khususnya negara berkembang. Tidak hanya itu, dalam mengencarkan programnya, UNICEF tidak hanya sendirian, tetapi juga membangun hubungan dengan baik secara eksternal maupun internal. Hal inilah yang membuat UNICEF dapat dipercaya dalam melaksanakan kinerjanya dalam masalah terkait dengan isu kesetaraan gender. Peranan UNICEF dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India dilakukan tidak hanya melihat dari salah satu aspek saja, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek misalnya UNICEF tidak hanya menaruh perhatian pada isu perdagangan anak

perempuan, tetapi juga isu terhadap anak-anak putus sekolah. Hal ini tentunya dapat dilihat sebagai bentuk cara UNICEF dalam mengatasi diskriminasi karena selama ini laki-laki di India selalu diprioritaskan. UNICEF berusaha untuk memberikan perspektif baru bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, namun UNICEF menaruh perhatian pada anak karena anak tersebut akan berkembang dengan pola pemikiran bahwa perempuan berhak mendapatkan hak yang sama.



BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang membahas peran UNICEF terhadap diskriminasi gender pada perempuan di India pada tahun 2017 hingga 2018. Adapun kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan

yang mencakup semua bab, sedangkan rekomendasi ditujukan untuk memberi rekomendasi terhadap penelitian berikutnya yang dapat melengkapi penelitian ini.

4.1 Kesimpulan

Permasalahan ketidaksetaraan gender di India menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya diskriminasi yang dialami oleh perempuan India. Hal ini menjadikan UNICEF sebagai organisasi internasional turut dalam penanganan isu tersebut. Dalam hal ini, UNICEF sendiri memiliki beragam cara dan kemampuan secara teknis dalam membantu menemukan solusi dari ketidaksetaraan gender yang terjadi di India. Peran UNICEF yang dilakukan dalam menghadapi diskriminasi gender di tahun 2014-2018 dengan melakukan berbagai program dan juga bekerja sama dengan banyak organisasi maupun pemerintahan.

Peran yang dilakukan UNICEF dalam mengatasi isu diskriminasi gender yaitu dengan bantuan secara teknis maupun keuangan. UNICEF melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada negara terkait dengan hal yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, tidak hanya pengawasan organisasi saja, tetapi juga menjalin kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dengan membuat program yaitu Country Programme Action Plan (CPAP) 2013-2017. UNICEF juga memberikan bantuan dana sebagai wujud dari kesetaraan gender di India. Apabila dilihat dalam perspektif managerial bahwa kerja sama dilihat sebagai bentuk pengawasan dalam menjamin kesetaraan gender di India.

Dalam menangani isu diskriminasi gender di India, UNICEF juga melakukan pengawasan dengan aktor lain yaitu UN Women. Pemerintah India juga turut dalam membantu pembuatan laporan UNICEF terkait dengan diskriminasi perempuan yang terjadi di tahun 2017-2018. Adapun program yang dilakukan UN Women dalam mengatasi hal tersebut yaitu Safe Cities dan Ring The Bell Bajo yang dilakukan di tahun 2017 yang tujuannya untuk mendorong agar individu terlibat dalam kasus kesetaraan gender. Program ini memberikan dana tabungan untuk memastikan bahwa perempuan terlibat dalam sektor politik. Hal ini dapat dilihat melalui UNICEF yang memberikan pengembangan kapasitas di India memungkinkan 1.600 perempuan pada tahun 2017 untuk bergabung dengan kader pekerja garis depan yang didominasi laki-laki yang menonjol secara politik yang disebut penggerak WASH, untuk memimpin kegiatan untuk mempromosikan desa bebas buang air besar sembarangan di negara bagian Bihar dan Odisha.

Tidak hanya bekerja sama dengan UN Women saja, tetapi dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India. UNICEF juga bekerja sama secara eksternal maupun internal. Adapun pihak eksternal yaitu berbagai organisasi seperti dengan Barclays. Selain itu juga bekerja sama dengan Johnson & Johnson dan Delhi Darevils yang mana untuk melindungi perempuan dalam diskriminasi gender. Secara internal, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah India maupun Kementerian Perempuan dan Pengembangan Anak dalam menangani masalah diskriminasi gender.

4.2 Rekomendasi

Penelitian Peran UNICEF dalam mengatasi diskriminasi gender terhadap perempuan di India pada tahun 2014-2018 hanya fokus dalam membahas program apa saja yang dilakukan oleh UNICEF ataupun aktor lain dalam kasus diskriminasi gender di India ini, sehingga sangat menarik jika penelitian selanjutnya membahas apakah program yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh pihak UNICEF berjalan dengan efektif atau tidak. Bisa saja penelitian selanjutnya meneliti bagaimana salah satu program yang sudah dilakukan oleh UNICEF berjalan, semakin memperburuk atau semakin memperbaiki keadaan dalam penanganan kasus diskriminasi gender yang ada di India. Penelitian selanjutnya bisa meneliti dengan rentang cakupan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonita, F. (2018). PERANAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ANAK DI INDIA. *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf><http://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html><https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022>[https://github.com/ethereum/wiki/wiki/len and Unwin](https://github.com/ethereum/wiki/wiki/len-and-Unwin).
- Archer, Clive. (1983). *International Organization*. London: George Ation. IOSR Journal of Humanities and Social Science. Vol 22(10). Pp 01-04.
- Archer, Clive. (2001). *International Organization : Third Edition*. London and New York: Routledge.
- Asmarita. (2015). PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI INDIA. *JOM FISIP*, 2(2), 1–15.
- Chania, I., & Moenir, H. D. (2021). Transmitter and Socialization: The Role of UNICEF in Preventing Girl Trafficking in India. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2(2), 62–80. <https://doi.org/10.25077/fetrian.2.2.62-80.2020>
- Clive, A. (n.d.). *International Organizations Third Edition*. Routledge. <http://malaysianindiansyouthforum.com/hpages.php?hid=110> diakses pada 27 Februari 2022.
- Joachim, et. al. (2008). *International Organizations and Implementation : Enforces, managers, authority*. London and New York: Routledge.
- Kassa, Shimelis. (2015). *Challenges and Opportunities of Women Political Participation in Ethiopia*. Journal of Global Economics. Vol 03.
- Kinnon, Catherinne A. Mac. "Sex Equality Under the Constitution of India : Problems, Prospects, and Personal Law". I-CON International Journal of Constitutional Law. Vol. 4. Issues 2. pp. 181-202.
- Krishnaveni D. (2017). *Gender Equity and Political Participai/White-Paper*<https://tore.tuhh.de/hand>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). PERAN UNICEF DALAM MENANGANI CHILD MARRIAGE DI INDIA TAHUN 2014-2016. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Kusumawardhana, I., & Nur Auliya, A. A. (2020). UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1(2), 341–378. <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.2.341-378.2019>
- Mareta, Sabilina. (2017). "Peran UN Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan India Terkait Kasus Diskriminasi Terhadap Perempuan Th 2011 - 2015". *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol. 6. No. 2.
- Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India. (2018). *Women and Men in India: A Statistical Compilation of Gender Related*

- Indicators in India*. Government of India. Dilansir dari http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Women%20and%20Men%20in%20India%202018.pdf pada 17 Januari 2022, 10.39 WIB.
- Mosse, Julia Cleves. (1993). *Half The World, Half A Chance : An Introduction to Gender and Development*. Oxford: Oxfam.
- Musa, S. (2012). Dowry Murders in India: The Law and Its Role in the Continuance of the Wife Burning Phenomenon. *Northwestern Interdisciplinary Law Review* , 227-245.
- Parmley, W. W. (2000). Annual Report. In *Journal of the American College of Cardiology* (Vol. 35, Issue 7). [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)00711-7](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)00711-7)
- Pewita, A. A dan Y. M. Yani. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Roy, S., & Chaman, C. (2017). Human Rights and Trafficking in Women and Children in India. *Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences*, Vol 1 Issue 5 , 1-9.
- Showkat, N. (2017). *Mapping of UNICEF India*. 4(2), 50–58.
- Sorensen, Robert Jackson & George. (2013). *Introduction to International Relations : Theories and Approaches, Fifth Edition*.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- UNICEF (2016). Achieving health and education outcomes through WASH in Schools. Retrieved from http://docs.exideindustries.com/pdf/EXIDE-_WASH%20Report_2016.pdf
- UNICEF India. (2017). Website <http://unicef.in>. 3. UNICEF India. (2010). Annual Report 2010. Retrieved from https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Communication_AR_2010.pdf. 4.
- Unicef. (2018). *Global Annual*.
- UNICEF. (2018). UNICEF Corporate and Philanthropic Partnerships: UNICEF. Dipetik Mei 27, 2018, dari UNICEF for every child: https://www.unicef.org/corporate_partners/index_24649.html
- UNICEF. (2021). *Social Protection & Gender Equality Outcomes Across the Life-Course, A Synthesis of Recent Findings on Health and Nutrition*.
- UNICEF. Improving Children Lives Transforming the Future dalam http://www.unicef.org/publications/files/Improving_Children_s_Lives_Transforming_the_Future_9_Sep_2014.pdf diakses pada 26 Februari 2022
- UNICEF's Deepshikha light up rural Girl's Lives dalam

HALAMAN PENGESAHAN
Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Mengatasi
Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan pada Tahun 2014-2018
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 Juni 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

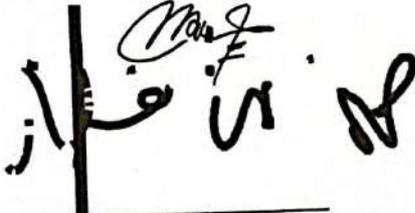


Hangga Fathana, S.IP., B.Int., St., M.A

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.

Tanda Tangan




PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 2 Juni 2022,

 
Tiara Marthadyta